

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Oleh: Klarita Ferji Triananda¹

Pembimbing: Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sijunjung serta keterkaitannya dengan pelayanan publik. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dalam menanggulangi hambatan tersebut.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung dan di Nagari Mundam Sakti Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Pengambilan subyek data dilakukan dengan metode *non-random sampling* kemudiandata yang diperoleh dikaji dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan hasil rumusan masalah yang diajukan. Pertama, pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sijunjung berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018. Terdapat sedikit perbedaan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sijunjung yaitu terdapat tanah ulayat sebagai salah satu objek PTSL. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sijunjung belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan aturan yang mengatur sehingga target PTSL 2019 belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan karena terdapatnya hambatan dalam pelaksanaan PTSL. Hambatan utama ialah terkait sistem adat di Minangkabau yaitu terkait tanah ulayat. Masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan persetujuan dari Ninik Mamak untuk mendaftarkan tanah ulayat pusako tinggi. Hambatan ini menjadi tantangan besar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung sehingga upaya yang dilakukan ialah memberikan sosialisasi dan pemahaman lebih terkait pentingnya pendaftaran tanah kepada tokoh penting dalam masyarakat adat, terutama kepada Ninik Mamak.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (S1 2016)

²Dosen Hukum Administrasi Negara Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

THE IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION IN THE REGENCY OF SIJUNJUNG

Author: Klarita Ferji Triananda¹

Academic Counselor: Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.²

ABSTRACT

This research aims to comprehend and analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (“*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap / PTSL*”) within the Regency of Sijunjung in correlation with public services. The research itself also aims to understand and analyze the current obstacles, as well as the efforts conducted by the Land Office of the Regency of Sijunjung in overcoming such obstacles.

This Legal Research uses the juridical-empirical research method that is descriptive to its nature. This Research uses primary and secondary data, in which all are based from primary, secondary and tertiary legal materials. The location of the research is conducted in the Land Office of the Regency of Sijunjung and in Nagari Mundam Sakti, Subdistrict IV Nagari, Regency of Sijunjung. The data collecting method used for this research is the non-random sampling method, which then the collected data are assessed and qualitatively analyzed.

Based on the result of the research and elaboration, it is concluded to have reached a result of the proposed research problem. First, the implementation of the PTSL Program in the Regency of Sijunjung is guided by the Ministerial Regulation ATR/BPN No. 6 of 2018. There is a slight difference in the implementation of PTSL in Regency of Sijunjung, namely the existence of customary land as one of the objects of PTSL. The implementation of PTSL in Regency of Sijunjung has not been fully carried out in accordance with the rules that govern, so the target of PTSL 2019 has not been fully reached. This is due to obstacle in implementation of PTSL. The main obstacle is related to the custom system in Minangkabau, which is related to customary land. Indeginious people find it difficult to get approval from Ninik Mamak to register the Ulayat Pusako Tinggi land. This obstacle is a big challenge for the Land Office of the Regency of Sijunjung so the effort made is to provide more information and socialization related to the important figures in indigenous communities, especially to Ninik Mamak.

Keywords: Public Service, Complete Systematic Land Registration

¹Student of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 2016).

²Lecturer at the Department of Administrative Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.